

# LPAKN-RI Resmi Buat Pengaduan Ke KPK.



Photo Faisal Haris,SH, di Gedung KPK.

Jakarta, PAMARTANUSANTARA. CO. ID| Lembaga pemantau aset dan

keuangan negara republik Indonesia ( LPAKN-RI) resmi buat pengaduan Ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selasa (23/02/2021) di Jakarta dengan Nomor 010/LSM/LPAKNRI/VII/2021.

Pengaduan tersebut berkaitan dengan anggaran Pelaksanaan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Kabupaten Mandailing Natal (MADINA) yang diduga tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan diduga banyak terjadi penyimpangan.

Kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) yang dikurcurkan Ditjen cipta karya kementerian PUPR RI tahun anggaran 2020, diketahui pada enam kecamatan di kabupaten Mandailing Natal yakni, Kecamatan hutabargot, kecamatan panyabungan barat, kecamatan naga juang, kecamatan sinunukan, kecamatan Lembah Sorik Merapi, dan kecamatan muara Batang gadis.

“Yang dilaporkan terkait masalah pelaksanaan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (pisew) yang ada di sejumlah kecamatan di kabupaten Mandailing Natal”, Kata Faisal Haris, SH, Ketua Umum LPAKN-RI, kepada awak Media.

“Dana pisew tersebut terbagi di enam kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. masing masing kecamatan mendapat jatah 600 juta rupiah yang dari APBN dengan tujuan agar dana tersebut untuk membangun infrastruktur semisal jembatan pengerasan jalan dan lain-lain”, Lanjutnya.

Ditambahkannya juga bahwa, menurut mereka fakta di lapangan dana tersebut di duga banyak yang diselewengkan dan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Kejanggalan yang terindikasi terjadinya penyelewengan anggaran demi kepentingan pribadi.

“Kami buat Laporan Resmi Ke KPK dengan harapan agar pihak terkait mengambil langkah cepat untuk penyidikan dan juga

pemanggilan serta memeriksa pengurus seperti camat dan juga kepala desa sebagai pihak bertanggung jawab agar aliran dana tersebut diusut tuntas”, Tegas Faisal Haris.

(Red)